

Proses Pemaknaan Simbolik Monumen Jayandaru di Alun-Alun Sidoarjo Tahun 2013-2015

Azzahrohtun Nabilah^{1*}, Septina Alrianingrum²

¹⁻² Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding email: azzahrohtunnabilah.22010@mhs.unesa.ac.id, septina@unesa.ac.id

Abstrak: Monumen Jayandaru dibangun di Alun-Alun Sidoarjo sebagai simbol identitas Kabupaten Sidoarjo melalui representasi udang dan bandeng. Kehadiran monumen ini memunculkan beragam pemaknaan, terutama setelah penambahan sembilan patung manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang pembangunan Monumen Jayandaru serta proses pemaknaan simboliknya pada 2013-2015. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Monumen Jayandaru dibangun melalui kerja sama PT Sekar Laut Tbk dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai simbol identitas daerah. Pemaknaan monumen berkembang seiring respons masyarakat terhadap simbol-simbol yang ditampilkan. Pemerintah daerah memaknai sembilan patung manusia sebagai representasi kehidupan masyarakat Sidoarjo, sedangkan sebagian kelompok sosial-keagamaan menilai keberadaannya kurang sesuai dengan karakter religius masyarakat. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa simbol di ruang publik bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Kata kunci: Monumen Jayandaru, Pemaknaan Simbolik, Ruang Publik, Kabupaten Sidoarjo

Abstract: The Jayandaru Monument was built in Sidoarjo Town Square as a symbol of Sidoarjo Regency through the representation of shrimp and milkfish. Its presence generated various interpretations, particularly after the addition of nine human statues. This study analyzes the background of the monument's construction and the process of its symbolic meaning-making during 2013–2015. It employs the historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings show that the monument was built as a regional identity symbol through collaboration between PT Sekar Laut Tbk and the Sidoarjo Regency Government under a Corporate Social Responsibility (CSR) program. Its meaning evolved alongside public responses to its symbols. The local government viewed the nine statues as representations of Sidoarjo society, while some socio-religious groups considered them inconsistent with the community's religious character. These differing interpretations indicate that public symbols are dynamic and shaped by social, cultural, and religious contexts.

Keywords: Jayandaru Monument, Symbolic Meaning-Making, Public Space, Sidoarjo Regency

PENDAHULUAN

Monumen merupakan salah satu bentuk representasi sejarah dan identitas yang dihadirkan di ruang publik. Keberadaannya tidak sekadar berfungsi sebagai penanda visual, tetapi juga menjadi media untuk merepresentasikan nilai, memori kolektif, dan karakteristik suatu daerah. Ruang publik tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, melainkan juga sebagai ruang simbolik yang memuat identitas dan memori kolektif masyarakat (Abidin Kusno, 2009). Oleh karena itu, monumen dapat dipahami sebagai bagian dari ruang publik yang merefleksikan cara pemerintah maupun masyarakat memaknai sejarah dan identitas daerahnya.

Pembangunan monumen di ruang publik sering dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk membangun identitas dan citra wilayah. Keberadaan monumen tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual dalam tata kota, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan sejarah, nilai budaya, serta identitas suatu daerah. Dalam konteks tersebut, monumen menjadi penanda yang memperkuat karakter dan citra kota melalui representasi simbolik yang diwujudkan dalam bentuk, konsep, maupun penempatannya di ruang publik (Rachmadi, G., Hendriyana, H., & Falah, A. M, 2023).

Akan tetapi, monumen sebagai simbol publik tidak selalu dimaknai secara seragam oleh masyarakat. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan kepentingan dapat melahirkan beragam penafsiran terhadap simbol-simbol yang hadir di ruang publik, sehingga tidak jarang

memunculkan kontestasi maupun perdebatan mengenai makna dan legitimasi simbol tersebut. Dengan demikian, monumen tidak hanya dipahami sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya proses pemaknaan dan negosiasi nilai antara pemerintah dan masyarakat (Setiono, L. S. 2010).

Identitas daerah melalui simbol-simbol visual tersebut menjadi bagian dari kebijakan publik yang berkaitan erat dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh sebab itu, monumen sebagai hasil kebijakan publik tidak cukup dipahami hanya dari aspek fisik atau estetika, melainkan juga perlu dikaji dari bagaimana simbol tersebut dipersepsikan, diterima, atau bahkan dipersoalkan oleh masyarakat (Nanang Setiawan, 2024). Makna yang terkandung dalam sebuah monumen tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat. Setiap simbol yang ditampilkan membuka peluang munculnya penafsiran yang berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Simbol merupakan bagian dari sistem kebudayaan yang memperoleh makna melalui proses interpretasi (Clifford Geertz, 1973).

Pembangunan monumen menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk membangun identitas wilayah. Melalui penataan ruang publik, pemerintah menghadirkan simbol-simbol yang diharapkan mampu merepresentasikan karakteristik daerah sekaligus memperkuat citra wilayah. Keberadaan *landmark* berperan penting dalam membentuk citra suatu wilayah karena menjadi penanda visual yang mudah dikenali oleh masyarakat (Kevin Lynch, 1960). Oleh sebab itu, pembangunan monumen tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menampilkan identitas wilayah di ruang publik.

Kabupaten Sidoarjo turut melakukan penataan kawasan Alun-Alun Sidoarjo melalui pembangunan Monumen Jayandaru yang mulai digagas pada tahun 2013 dan direalisasikan pada tahun 2014. Pemberitaan *Jawa Pos* menjelaskan bahwa monumen tersebut dirancang dengan mengangkat simbol udang dan bandeng sebagai identitas Kabupaten Sidoarjo serta diharapkan menjadi ikon daerah. Pembangunan monumen dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Sekar Laut Tbk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterlibatan PT Sekar Laut Tbk menunjukkan bahwa pembangunan Monumen Jayandaru tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi sektor swasta dalam penyediaan ruang publik.

Keberadaan sembilan patung manusia kemudian memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memaknai patung-patung tersebut sebagai representasi kehidupan sosial masyarakat Sidoarjo. Sebaliknya, sebagian kelompok sosial-keagamaan menilai bahwa figur manusia pada monumen tidak sejalan dengan karakter religius masyarakat Sidoarjo. Perbedaan pemaknaan tersebut berkembang menjadi polemik yang berujung pada pemindahan sembilan patung manusia pada tahun 2015. Peristiwa ini menunjukkan bahwa makna simbol di ruang publik tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembangunan Monumen Jayandaru serta proses pemaknaan simboliknya pada periode 2013-2015. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah lokal dengan menunjukkan bahwa monumen sebagai simbol di ruang publik tidak hanya merepresentasikan identitas daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi pembentukan, perubahan, dan negosiasi makna dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan pembangunan dan

proses pemaknaan simbolik Monumen Jayandaru. Sumber primer yang digunakan meliputi arsip *Naskah Perjanjian Hibah Daerah* pembangunan Monumen Jayandaru, dokumentasi, pemberitaan media massa, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan maupun polemik Monumen Jayandaru. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Tahap kritik sumber (verifikasi) dilakukan dengan menguji keaslian dan kredibilitas sumber melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari arsip, pemberitaan media, dokumentasi, dan hasil wawancara. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan berbagai fakta sejarah untuk menjelaskan latar belakang pembangunan, proses pemaknaan simbolik, serta dinamika yang menyertai Monumen Jayandaru pada periode 2013-2015. Tahap terakhir, historiografi, dilakukan dengan menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan sejarah secara kronologis dan deskriptif-analitis.

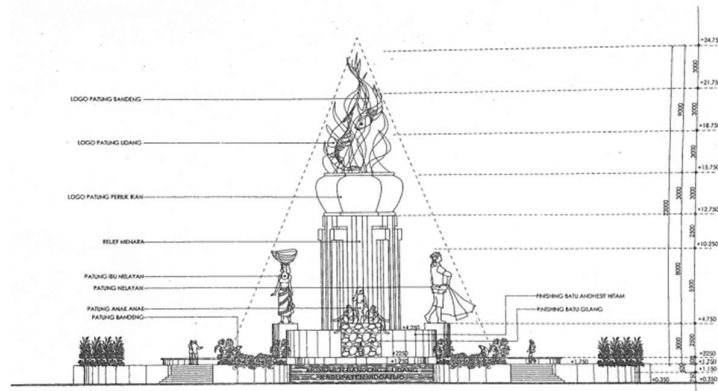
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembangunan Monumen Jayandaru

Pembangunan Monumen Jayandaru berawal dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan simbol visual yang merepresentasikan identitas daerah di ruang publik. Sebelum pembangunan monumen, kawasan Alun-Alun Sidoarjo telah memiliki Tugu Adipura sebagai penanda keberhasilan daerah dalam bidang kebersihan. Namun, simbol tersebut dinilai belum mampu merepresentasikan karakteristik khas Kabupaten Sidoarjo karena juga dimiliki oleh berbagai daerah lain yang memperoleh penghargaan serupa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan sebuah *landmark* yang dapat memperkuat identitas Kabupaten Sidoarjo melalui simbol yang lebih khas.

Gagasan pembangunan Monumen Jayandaru mulai berkembang pada tahun 2013 sebagai bagian dari penataan kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara, realisasi pembangunan dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Sekar Laut Tbk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam kerja sama tersebut, PT Sekar Laut Tbk menginisiasi dan membiayai pembangunan monumen, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan persetujuan pembangunan, menyediakan lokasi di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, serta menerima hasil pembangunan melalui mekanisme hibah daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan PT Sekar Laut Tbk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Setelah proses hibah selesai, Monumen Jayandaru ditetapkan sebagai aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara, konsep visual Monumen Jayandaru dirancang oleh I Wayan Winten berperan sebagai perancang artistik Monumen Jayandaru yang menerjemahkan gagasan PT Sekar Laut Tbk ke dalam bentuk visual tiga dimensi melalui simbol uang, bandeng, ornamen kerupuk, serta patung-patung manusia yang merepresentasikan potensi ekonomi dan kehidupan sosial Kabupaten Sidoarjo. Dalam pandangan pemerintah daerah, keseluruhan unsur visual tersebut dipahami sebagai representasi karakteristik Kabupaten Sidoarjo yang diwujudkan melalui sebuah *landmark* di kawasan Alun-Alun Sidoarjo.



Gambar 1. Desain Awal Monumen Jayandaru

Sumber: Naskah Hibah Hibah Daerah, Arsip Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2015.

Pemberitaan *Jawa Pos* menjelaskan bahwa Monumen Jayandaru dirancang dengan mengangkat simbol udang dan bandeng sebagai identitas Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, pada bagian dasar monumen ditempatkan sembilan patung yang menggambarkan aktivitas masyarakat, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui konsep tersebut, Monumen Jayandaru diharapkan menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo. Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak PT Sekar Laut Tbk yang menjelaskan bahwa simbol udang, bandeng, dan figur-figur masyarakat dipilih untuk merepresentasikan potensi ekonomi sekaligus kehidupan sosial masyarakat Sidoarjo.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Monumen Jayandaru tidak hanya berorientasi pada penataan fisik ruang publik, tetapi juga merupakan upaya membangun identitas daerah melalui simbol-simbol visual. Dalam perspektif Kevin Lynch, keberadaan *landmark* berfungsi sebagai penanda visual yang membentuk citra suatu wilayah. Oleh karena itu, Monumen Jayandaru dapat dipahami sebagai representasi identitas Kabupaten Sidoarjo yang diwujudkan melalui simbol-simbol yang dipilih oleh pemerintah daerah bersama pihak swasta untuk ditampilkan di ruang publik.

B. Proses Pemaknaan Simbolik Monumen Jayandaru

Setelah diresmikan, Monumen Jayandaru menjadi bagian dari ruang publik yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Simbol udang dan bandeng dipilih sebagai identitas Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sembilan patung pada bagian dasar monumen menggambarkan aktivitas masyarakat, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil (UKM). Melalui konsep tersebut, Monumen Jayandaru diharapkan menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo (*Jawa Pos*, 2 Februari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Sekar Laut Tbk, pemilihan unsur-unsur visual tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Simbol udang dan bandeng dipilih karena kedua komoditas tersebut telah lama dikenal sebagai ciri khas Kabupaten Sidoarjo sekaligus merepresentasikan potensi perikanan tambak yang berkembang di wilayah pesisir. Kabupaten Sidoarjo memiliki kawasan pertambakan yang cukup luas, terutama di wilayah timur, sehingga budidaya udang dan bandeng menjadi salah satu mata pencaharian yang telah berkembang sejak lama dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kedua komoditas tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga telah berkembang menjadi identitas daerah yang dikenal secara luas oleh masyarakat.

Pemaknaan tersebut kemudian diperkuat melalui keberadaan sembilan patung manusia yang ditempatkan pada bagian dasar monumen. Berdasarkan hasil wawancara, patung-patung

tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Figur nelayan dan petambak merepresentasikan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan pertambakan. Figur petani menggambarkan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian yang masih berkembang di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, figur pedagang, pembuat kerupuk, dan pengrajin batik dipilih sebagai representasi berkembangnya sektor perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kreatif yang turut membentuk karakter ekonomi daerah. Kehadiran figur anak-anak juga dimaksudkan sebagai simbol keberlanjutan kehidupan masyarakat dan generasi penerus Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 2. Patung-patung pada Monumen Jayandaru

Sumber: <https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa/5b2YqdnN-patung-jayandaru>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Sekar Laut Tbk, keseluruhan unsur visual tersebut dirancang untuk menghadirkan representasi Kabupaten Sidoarjo secara utuh melalui simbol-simbol yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan perusahaan maupun pemerintah daerah, Monumen Jayandaru tidak dimaksudkan sekadar sebagai elemen estetika kawasan Alun-Alun Sidoarjo, tetapi juga sebagai media untuk memperkenalkan identitas daerah kepada masyarakat maupun pengunjung. Dengan demikian, simbol udang dan bandeng dipahami sebagai representasi potensi unggulan daerah, sedangkan patung-patung manusia menggambarkan kehidupan sosial serta berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo.

Penempatan Monumen Jayandaru di kawasan Alun-Alun Sidoarjo menyebabkan simbol-simbol tersebut berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun, keberadaan monumen pada awalnya memperoleh respons yang cenderung positif. Sebagian masyarakat memandang Monumen Jayandaru sebagai ikon baru Kabupaten Sidoarjo yang memperindah kawasan alun-alun sekaligus memberikan identitas visual yang lebih khas dibandingkan sebelumnya. Simbol udang dan bandeng dianggap mampu merepresentasikan Kabupaten Sidoarjo karena telah lama dikenal sebagai komoditas unggulan daerah. Kehadiran monumen juga mendorong masyarakat memanfaatkan kawasan alun-alun sebagai tempat berkumpul, berolahraga, maupun berfoto sehingga memperkuat fungsi alun-alun sebagai ruang publik.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memaknai Monumen Jayandaru sebagai simbol yang menampilkan sisi positif Kabupaten Sidoarjo. Selama ini Kabupaten Sidoarjo lebih banyak dikenal melalui peristiwa Lumpur Lapindo yang

memberikan citra negatif terhadap daerah. Kehadiran Monumen Jayandaru dipandang mampu menghadirkan identitas baru yang menampilkan potensi ekonomi, kehidupan sosial, dan karakter masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, monumen tidak hanya berfungsi sebagai penanda visual di ruang publik, tetapi juga menjadi media yang membangun citra daerah melalui simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, pemaknaan tersebut tidak diterima secara seragam oleh seluruh masyarakat. Seiring dengan semakin dikenalnya Monumen Jayandaru, perhatian masyarakat mulai tertuju pada keberadaan sembilan patung manusia yang mengelilingi bagian dasar monumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sidoarjo, pada dasarnya mereka tidak mempermasalahkan keberadaan Monumen Jayandaru sebagai ikon Kabupaten Sidoarjo. Simbol utama berupa udang dan bandeng tetap dipandang sebagai representasi identitas daerah yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sidoarjo. Penolakan lebih diarahkan pada keberadaan sembilan patung manusia yang dinilai kurang etis untuk ditempatkan di ruang publik, terutama karena lokasinya berada di kawasan Alun-Alun Sidoarjo yang berdekatan dengan Masjid Agung Sidoarjo.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberatan yang muncul bukan ditujukan terhadap pembangunan monumen secara keseluruhan, melainkan terhadap bentuk representasi visual berupa patung manusia. Dalam pandangan kelompok tersebut, figur manusia berukuran besar yang ditempatkan di ruang publik berpotensi menimbulkan penafsiran yang kurang selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, keberadaan patung-patung tersebut dipandang kurang mencerminkan karakter religius masyarakat Sidoarjo yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tradisi keislaman dan budaya pesantren yang kuat.

Penafsiran tersebut dapat dipahami melalui pandangan fikih Islam mengenai patung. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pembahasan mengenai patung dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisiknya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, fungsi, dan konteks keberadaannya. Mayoritas ulama memang mengharamkan patung tiga dimensi yang menyerupai makhluk bernyawa, terutama apabila dikaitkan dengan unsur pengagungan yang berpotensi menyerupai praktik penyembahan berhala. Namun, Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai patung yang dibuat untuk tujuan selain pemujaan, seperti kepentingan pendidikan, permainan anak-anak, atau fungsi-fungsi lain yang tidak mengandung unsur pengagungan. Dengan demikian, pembahasan mengenai patung dalam fikih tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada tujuan dan konteks penggunaannya.

Dalam konteks penelitian ini, pandangan fikih tersebut tidak digunakan untuk menentukan benar atau salahnya keberadaan Monumen Jayandaru maupun untuk menilai pandangan kelompok tertentu. Sebaliknya, konsep tersebut membantu menjelaskan sistem nilai keagamaan yang menjadi dasar penafsiran sebagian organisasi masyarakat terhadap keberadaan sembilan patung manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan respons masyarakat terhadap Monumen Jayandaru tidak semata-mata dipengaruhi oleh bentuk fisik monumen, tetapi juga oleh kerangka nilai yang digunakan dalam memaknai simbol-simbol yang terdapat di dalamnya.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Clifford Geertz (1973) yang menjelaskan bahwa simbol memperoleh makna melalui proses interpretasi dalam suatu sistem kebudayaan. Dalam kasus Monumen Jayandaru, pemerintah daerah dan PT Sekar Laut Tbk memaknai simbol-simbol pada monumen sebagai representasi identitas daerah dan kehidupan sosial masyarakat. Sebaliknya, sebagian organisasi masyarakat menafsirkan figur manusia melalui kerangka nilai keagamaan yang berbeda sehingga menghasilkan pemaknaan yang tidak sama. Dengan demikian, makna Monumen Jayandaru tidak sepenuhnya ditentukan oleh

pihak yang merancanganya, tetapi dibentuk melalui proses interaksi dan interpretasi berbagai aktor sosial yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan sistem nilai yang berbeda.

C. Dinamika Pemaknaan Simbolik Monumen Jayandaru Tahun 2013-2015

Pemaknaan terhadap Monumen Jayandaru mulai berubah setelah perhatian masyarakat tertuju pada keberadaan sembilan patung manusia di bagian dasar monumen. Sebagian kelompok masyarakat menilai figur-figur tersebut kurang sesuai dengan karakter religius Kabupaten Sidoarjo yang dikenal memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Perbedaan penafsiran terhadap Monumen Jayandaru mencapai puncaknya pada tahun 2015 ketika muncul tuntutan agar sembilan patung manusia diturunkan dari kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Penolakan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa keberadaan figur manusia dalam monumen tidak mencerminkan karakter religius masyarakat Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Ansor, keberatan tersebut bukan ditujukan terhadap Monumen Jayandaru sebagai ikon daerah, melainkan terhadap keberadaan sembilan patung manusia yang dipandang kurang selaras dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Pandangan serupa juga berkembang di sejumlah organisasi masyarakat, seperti Pemuda Muhammadiyah, PMII, IPNU, dan LDII, yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah mengenai keberadaan patung-patung tersebut. Pemberitaan *Jawa Pos* pada Februari 2015 menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut berkembang menjadi polemik publik hingga dilakukan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Sekar Laut Tbk mengenai penyelesaian persoalan tersebut.

Sebaliknya, pemerintah daerah tetap berpendapat bahwa patung-patung tersebut merupakan representasi kehidupan sosial masyarakat dan tidak memiliki tujuan lain di luar fungsi simboliknya. Perbedaan pandangan tersebut kemudian diselesaikan melalui serangkaian pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT Sekar Laut Tbk, dan perwakilan organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang berlangsung secara tertutup hingga akhirnya dicapai kesepakatan untuk memindahkan sembilan patung manusia dari Monumen Jayandaru.

Pada saat polemik berkembang, sembilan patung manusia tersebut belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga secara hukum masih menjadi aset milik PT Sekar Laut Tbk atau Sekar Group. Oleh karena itu, proses penurunan dan pemindahan patung dilakukan oleh pihak PT Sekar Laut Tbk dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, proses penurunan berlangsung selama sekitar dua hingga tiga hari dan dilakukan secara bertahap menggunakan alat berat berupa *crane* karena setiap patung memiliki bobot hampir mencapai lima ton serta terbuat dari material semen timbul dengan struktur rangka besi. Setelah diturunkan dari kawasan Alun-Alun Sidoarjo, sembilan patung manusia tersebut kemudian dipindahkan menggunakan truk kontainer ke kawasan Finna Golf & Country Club di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yang merupakan bagian dari properti milik Sekar Group, sehingga patung-patung tersebut tetap berada dalam pengelolaan pihak perusahaan setelah tidak lagi ditempatkan di ruang publik Kabupaten Sidoarjo.

Pemindahan sembilan patung manusia tersebut mengubah bentuk awal Monumen Jayandaru. Setelah patung dipindahkan, monumen tetap mempertahankan simbol utama berupa udang dan bandeng sebagai representasi identitas Kabupaten Sidoarjo. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang telah dirancang sebelumnya harus berhadapan dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, perubahan bentuk Monumen Jayandaru dapat dipahami sebagai hasil proses negosiasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dalam merespons perbedaan penafsiran terhadap simbol-simbol yang terdapat pada monumen. Perubahan ini menegaskan bahwa Monumen Jayandaru yang ada saat ini tidak sepenuhnya

sama dengan konsep awalnya, melainkan telah mengalami transformasi sebagai akibat dari proses interaksi antara kebijakan pemerintah, nilai-nilai sosial-keagamaan masyarakat, dan berbagai kepentingan yang berkembang selama polemik berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemaknaan simbolik Monumen Jayandaru berlangsung secara dinamis sepanjang periode 2013-2015. Makna monumen tidak hanya dibentuk oleh tujuan awal pembangunannya, tetapi juga oleh respons, pengalaman, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan pandangan Clifford Geertz (1973), makna simbol tidak melekat secara tetap pada suatu objek, melainkan terbentuk melalui proses interpretasi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Monumen Jayandaru dapat dipahami sebagai simbol publik yang terus mengalami pembentukan, perubahan, dan negosiasi makna sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian polemik dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT Sekar Laut Tbk, dan perwakilan organisasi masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dengan tujuan mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Kesepakatan yang dihasilkan adalah memindahkan sembilan patung manusia dari Monumen Jayandaru, sementara simbol utama berupa udang dan bandeng tetap dipertahankan sebagai identitas monumen.

Perubahan fisik tersebut menunjukkan bahwa makna Monumen Jayandaru tidak bersifat statis. Simbol yang pada awalnya dimaksudkan untuk merepresentasikan kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan makna sebagai akibat dari proses negosiasi yang melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ruang publik menjadi arena berlangsungnya proses pembentukan dan perubahan makna simbolik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemaknaan simbolik Monumen Jayandaru berlangsung secara dinamis sepanjang periode 2013-2015. Makna monumen tidak hanya dibentuk oleh tujuan awal pembangunannya, tetapi juga oleh respons masyarakat, nilai-nilai budaya, serta pertimbangan keagamaan yang berkembang pada masa tersebut. Dengan demikian, Monumen Jayandaru tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga menjadi ruang negosiasi makna yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Monumen Jayandaru merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membangun identitas daerah melalui simbol-simbol yang merepresentasikan potensi ekonomi dan karakteristik masyarakat Sidoarjo. Pembangunan monumen yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT Sekar Laut Tbk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) memperlihatkan bahwa pembentukan identitas daerah tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Simbol udang, bandeng, dan sembilan patung manusia dirancang sebagai representasi kehidupan sosial masyarakat sekaligus penanda identitas Kabupaten Sidoarjo di ruang publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap Monumen Jayandaru tidak bersifat tunggal maupun tetap. Makna monumen berkembang melalui interaksi antara pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan warga Sidoarjo. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan melahirkan penafsiran yang berbeda terhadap sembilan patung manusia, sehingga memunculkan polemik yang berakhir dengan pemindahan patung pada tahun 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa simbol di ruang publik merupakan hasil proses negosiasi sosial yang terus mengalami perubahan sesuai

dengan konteks masyarakat. Dengan demikian, Monumen Jayandaru tidak hanya berfungsi sebagai ikon daerah, tetapi juga menjadi bukti historis bahwa makna suatu simbol dibentuk, diperdebatkan, dan dinegosiasikan melalui dinamika sosial yang berlangsung di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- PT Sekar Laut Tbk., & Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2015). Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Hibah Bangunan Monumen Jayandaru.
- Frizal. (2015, February 6). Pikirkan pot sebagai pengganti patung. Jawa Pos Metropolis.
- Frizal. (2015, February 26). Jayandaru bakal tuntas akhir bulan. Jawa Pos Metropolis.
- Rista, R. (2015, February 5). Monumen Jayandaru, ikon Sidoarjo ke internasional. Jawa Pos Metropolis.
- Rachmadi, G., Hendriyana, H., & Falah, A. M. (2023). *Kontekstualitas dan Representasional Patung Monumen di Kota Bandung*. Panggung, 33(2), 155–171. <https://doi.org/10.26742/panggung.v33i2.2609>
- Setiawan, N. (2024). Ruang tanpa batas: Sejarah dan politik memori pada public space. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(2), 149–163. <https://doi.org/10.21831/moz.v11i2.45212>
- Setiono, L. S. (2010). *Keberagaman dan Eksklusi Sosial: Simbol Identitas dalam Ruang Publik*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 12(3), 117–136. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.154>
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jilid 4, A. Hayyie al-Kattani, dkk., Penerj.). Gema Insani.
- Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. Basic Books.
- Kusno, A. (2009). Ruang publik, identitas dan memori kolektif: Jakarta pasca-Suharto. Ombak.
- Lynch, K. (1960). The image of the city. MIT Press.